

Pengantar

Kudeta militer di Portugal yang berhasil menumbangkan rejim otoriter Presiden Thomaz dan Rui Saetano tidak hanya membawa perubahan-perubahan radikal di negeri itu tetapi juga membuka lembaran baru dalam sejarah perkembangan politik negeri-negeri jajahannya, khususnya di Afrika. Janji-janji yang diberikan rejim baru pimpinan Jendral De Spinoza dan langkah-langkah yang sejauh ini diambilnya menunjukkan bahwa terhadap negeri-negeri itu Portugal menempuh jalan yang berlainan dengan politik kolonial rejim sebelumnya. Politik baru ini didasarkan atas keyakinan bahwa perang kolonial di Afrika tidak akan memberikan hasil yang diharapkan. Pengalaman 13 tahun terakhir ini menunjukkan bahwa operasi-operasi militer yang melibatkan sebagian besar angkatan perang Portugis selain gagal mencapai sasarnya juga merupakan suatu bencana bagi negara. Politik kolonial itu tidak hanya banyak minta korban jiwa dan menelan banyak biaya, tetapi juga berulang kali dikutuk negara-negara anti kolonial dan PBB dan semakin mengisolir Portugal dalam pergaulan internasional.

Tulisan ini bermaksud membahas perkembangan politik negeri-negeri jajahan Portugis di Afrika itu. Secara berturut-turut akan dibicarakan Portugal dan koloni-koloninya, perjuangan kemerdekaan negeri-negeri jajahan itu, peranan negara-negara Afrika dalam perjuangan itu, prospek kemerdekaan negeri-negeri itu dan hari depan Timor Portugis. Tulisan akan ditutup dengan beberapa kesimpulan.

I. Portugal dan koloni-koloninya

Portugal adalah negara kolonial yang paling lama menentang arus dekolonisasi. Lama setelah negara-negara kolonial

lainnya memberikan kemerdekaan kepada negeri-negeri jajahannya, Portugal masih berusaha mempertahankan koloni-koloninya dengan perang kolonial yang mahal tetapi tidak memberikan hasil yang diharapkan. Sebagai akibatnya Portugal menjadi negara terbelakang di Eropa dan terisolir dalam pergaulan internasional.

1. Republik Portugis

Dengan penduduk sekitar 10 juta orang dan wilayah seluas 91.600 km², Portugal termasuk negara kecil. Baik dari segi kekayaan alam maupun keuangannya termasuk negara Eropa yang miskin. Pendapatannya per jiwa adalah seperempat pendapatan per jiwa negara-negara tetangganya. Perekonomiannya masih berkisar pada pertanian, yang menyerap sekitar 40% dari tenaga kerja, sedangkan industrinya belum berkembang. Walaupun kerapatan penduduknya rendah, sekitar 100 orang per km², dalam situasinya sekarang ini Portugal kelebihan penduduk. Setiap tahun beribu-ribu orang berpindah ke negeri-negeri lain sebagai emigran. Selain itu lebih dari sejuta orang tenaga kerjanya bekerja di negara-negara Eropa yang lebih maju dan lebih makmur, karena di negeri mereka sendiri tiada kesempatan kerja. Salah satu faktor keadaan itu ialah besarnya beban finansial yang harus dipikul negara sehubungan dengan perang kolonialnya di Afrika sejak tahun 1961.

Menurut UUD yang kini berlaku, yaitu UUD tahun 1933 dengan beberapa amandemen, negara Portugal selain wilayah metropolitan tersebut juga meliputi negeri-negeri jajahannya di Asia dan Afrika berupa 6 propinsi seberang lautan (provincia ultramarina). Propinsi-propinsi seberang lautan itu diberi otonomi terbatas dan selain pemerintah juga mempunyai badan legislatif sendiri, tetapi merupakan bagian integral negara dan mempunyai wakil-wakilnya di Majelis Nasional (Parlemen) di Lisabon. Keseluruhannya itu merupakan Republica Portuguesa, Republik Portugis.¹

¹Cf. The Europa Year Book 1973: A World Survey, I (London, 1973) hal. 1134-1135; "Portugal", Encyclopaedia Americana (1971).

2. Koloni-koloni Portugis

Sampai tahun 1951 negeri-negeri jajahan Portugis di Asia dan Afrika itu secara resmi memiliki status koloni dan ditempatkan di bawah Menteri Koloni-koloni, yang menetapkan garis-garis besar pemerintahan kolonial dan mengangkat Gubernur Jendral atau Gubernur untuk melaksanakannya di wilayah masing-masing. Pada tahun 1951 koloni-koloni itu dijadikan propinsi, yang pada tahun 1971 diberi otonomi terbatas yang diperluas dua tahun kemudian¹. Sejak tahun 1961 setiap penduduk dapat menjadi warga negara Portugis dengan mendaftarkan diri di kantor catatan sipil. Akan tetapi kenyataannya Pemerintah Portugis menganggap sepi aspirasi kemerdekaan rakyat Afrika dan berusaha menumpas gerakan-gerakan kemerdekaan. Oleh sebab itu negeri-negeri tersebut dapat dianggap sebagai jajahan atau koloni. Itulah pendapat negara-negara Afrika dan PBB, yang telah berkali-kali minta kepada Portugal agar memberikan kemerdekaan kepada negeri-negeri itu.

Jajahan Portugis ialah Angola di Afrika Barat, Guinea Bissau di sebelah Utaranya, Cape Verde, Sao Tomé dan Principe lepas pantai Afrika Barat, Mozambique di Afrika Timur, Timor Portugis dan Macao. Yang penting ialah Mozambique, Angola dan Guinea Bissau. Wilayah Mozambique adalah seluas 734.960 km² dan penduduknya 7.922.000 (1972), termasuk 185.000 orang kulit putih. Angola meliputi wilayah seluas 1.246.700 km² dan penduduk 5.710.000 orang (1972), termasuk 400.000 orang kulit putih. Guinea Bissau adalah seluas 36.125 km² dan penduduknya 579.000 orang (1972), termasuk 2.500 orang kulit putih. Selain itu di Mozambique ditempatkan sekitar 70.000 orang militer, di Angola 45.000 orang dan di Guinea Bissau sekitar 30.000 orang pasukan Portugis (lihat Tabel 1).

¹Cf. Basil Davidson, "Recent history of Portugal's African territories", Africa South of the Sahara 1972 (London, 1972), hal. 144; "Portuguese overseas provinces", The Europa Year Book 1973: A World Survey, II (London, 1973), hal. 1232; Joseph E. Dynan, "Transformation of Portuguese overseas territories", AP yang dikutip The Jakarta Times, 28 Maret 1973.

TABEL I

NEGERI-NEGERI JAJAHAN PORTUGIS			
Nama negeri	luasnya dalam km2	Penduduknya	Angkatan Bersenjata
Angola	1.246.000	5.710.000	45.000
Cape Verde	4.033	260.000	-
Mozambique	783.028	7.922.000	70.000
Guinea Bissau	36.125	579.000	30.000
Sao Tomé dan Príncipe	963	62.000	-
Macao	15	330.000	-
Timor Portugis	15.000	633.000	2.000

Sumber: The Book of the World 1973 (New York, 1972); Encyclopaedia Americana (1971); Africa South of the Sahara 1972 (London, 1972).

3. Politik kolonial Portugal

Portugal berusaha mempertahankan koloni-koloninya karena berbagai alasan. Pertama, sebagai negara kecil dan miskin Portugal merasa memerlukan koloni-koloninya untuk menunjang ekonominya yang lemah dan untuk menyalurkan sebagian kelebihan-nya penduduknya. Selain itu, karena perkembangan historis peranan Portugal sebagai negara kolonial berakar dalam kesadaran nasional, sehingga bangsa Portugis merasa lebih terikat dengan bangsa-bangsa jajahannya. Berlainan dengan negara-negara kolonial lainnya, bangsa Portugis tidak mengenal diskriminasi rasial dan di mana-mana melakukan politik asimilasi. Orang-orang Portugis tidak hanya menunjukkan suatu toleransi terhadap bangsa pribumi dan suatu kemampuan dan kesediaan untuk hidup bersama dengan mereka, tetapi juga banyak yang kawin dengan wanita-wanita pribumi. Kecuali itu kebanyakan politisi Portugis yakin, bahwa dekolonisasi yang dengan cepat dilakukan negara-negara kolonial lainnya atas tekanan baik intern maupun ekstern, merupakan suatu kesalahan besar. Kenyataannya banyak negeri Afrika belum siap untuk memperoleh kemerdekaan. Dalam hubungan ini mereka menunjuk pada kekacauan yang terjadi di Kongo sesudah kemerdekaan. Akhirnya sejak UUD 1933 Portugal hidup terasing di luar aliran-aliran pokok opini dunia, sehingga boleh dikatakan kebal terhadap gerakan-gerakan politik di negara-negara lain dan

skeptis terhadap gagasan-gagasan liberal seperti hak untuk menentukan nasib sendiri dan pemerintahan supranasional¹.

Terhadap kecaman opini dunia, Pemerintah Portugal mengemukakan bahwa kolonialisme Portugis adalah berlainan dengan kolonialisme negara-negara lain dalam arti bahwa negeri jajahan merupakan bagian integral negara. Sejak tahun 1951 negeri-negeri jajahannya mempunyai status propinsi Portugis dan sejak 1961 kepada semua penduduk diberikan hak untuk menjadi warga negara Portugis.

Dengan pertimbangan-pertimbangan itu Pemerintah Portugis tidak memperhatikan aspirasi-aspirasi mereka sebagai bangsa dan menindak gerakan-gerakan nasional untuk mendapatkan kemerdekaan. Seperti di Portugal Pemerintah kolonial hanya mengizinkan satu partai politik, yaitu Uni Nasional yang kemudian dirubah namanya menjadi Aksi Nasional Rakyat. Partai-partai politik lainnya dilarang, sehingga kaum nasionalis terpaksa bergerak di bawah tanah atau mengungsi ke luar negeri.

II. Perjuangan kemerdekaan

Seperti di negeri-negeri Afrika lainnya, di negeri-negeri jajahan Portugis lambat laun timbullah kesadaran nasional di kalangan rakyat yang berkembang menjadi gerakan kemerdekaan yang dilancarkan kaum nasionalis. Oleh sebab jalan konstitusional untuk mendapatkan kemerdekaan tidak mungkin, gerakan-gerakan kemerdekaan itu terpaksa mengambil jalan kekerasan. Pemimpin-pemimpin gerakan yang tidak dipenjarakan menyusun kekuatan di negara-negara tetangga dan dari wilayahnya melancarkan perang gerilya. Dengan demikian pecahlah suatu konfrontasi bersenjata yang makin lama makin sengit dan makin meluas.

¹Cf. George Martelli, "The issues internationalized", dalam David M. Abshire dan Michael A. Samuels (Ed.), Portuguese Africa. A Handbook (New York - Washington - London, 1969), hal. 367.

1. Gerakan kemerdekaan

Biarpun Angola, Mozambique dan Guinea Bissau pada tahun 1951 mendapat status propinsi, rakyatnya merasa tidak puas dan menuntut kemerdekaan. Suatu minoritas Negro dan Mestis (keturunan Eropa dan Negro) menjadi sadar bahwa keadaan mereka kalah baik dengan keadaan bangsa-bangsa Afrika lain ataupun orang-orang Portugis, dan pada tahun 1950-an mulai membentuk kelompok-kelompok rahasia kecil. Sesudah tahun 1953 mereka mendapat angin dari nasionalisme Afrika yang memperjuangkan kemerdekaan dan berhasil mencapai sasarnya di negeri-negeri tetangga.

Nasionalisme di koloni-koloni Portugis itu mula-mula hanya berupa protes terhadap rejim kolonial yang menindas dan memperbudak rakyat, tetapi lambat laun mendapatkan banyak pengaruh dan meningkat menjadi suatu gerakan yang tidak hanya menuntut perlakuan yang wajar dan perbaikan nasib rakyat, tetapi juga hak untuk menentukan nasib sendiri dan kemerdekaan¹.

2. Perang gerilya

Oleh sebab Pemerintah Kolonial Portugis menentang gerakan kemerdekaan dan melarang kegiatan politik di luar partainya, Uni Nasional, pemimpin-pemimpin nasionalis yang tidak dimasukkan penjara sebagai tahanan politik lari ke luar negeri untuk menyusun kekuatan untuk melancarkan perang kemerdekaan. Dari pangkalan-pangkalan di negara-negara tetangga mereka melancarkan operasi-operasi mereka. Mula-mula aksi-aksi itu tidak menimbulkan kekawatiran di pihak Portugis, tetapi lambat laun menjadi suatu tantangan berat bagi kelangsungan kekuasaannya di negeri-negeri itu. Para gerilyawan melancarkan suatu perang gerilya yang makin lama makin efisien sejalan dengan perbaikan organisasi, disiplin, latihan, logistik, taktik dan persenjataan.

Pemberontakan mulai di Angola pada awal Februari 1961 ketika pejuang-pejuang Front Nasional Pembebasan Angola (FNLA) menyerbu penjara pusat di Luanda untuk membebaskan

¹Cf. Basil Davidson, *loc. cit.* hal. 146; Michael A. Samuels, "The nationalist parties", dalam David M. Abshire dan Michael A. Samuels (Ed.) *op. cit.* hal. 389 - 404.

tahanan-tahanan politik. Serangan yang tidak berhasil mencapai sasarannya itu disusul dengan pemberontakan di Angola Utara yang untuk sementara waktu dikuasai kaum pemberontak. Pemerintah Portugis akhirnya berhasil menumpas pemberontakan itu dengan pasukan-pasukan bantuan yang dikerahkan dari Portugal, tetapi kejadian itu mendorong kaum nasionalis di Guinea Bissau dan Mozambique untuk mempercepat kegiatannya. Pada tahun 1962 Partai Afrika untuk Kemerdekaan Guinea dan Cape Verde (PAIGC) pimpinan Dr. Amilcar Cabral mulai pemberontakan di Guinea Bissau dan pada tahun 1964 gerilyawan-gerilyawan Front Pembebasan Mozambique (FRELIMO) mulai serangan-serangannya dari Tanzania, sedangkan pejoang-pejoang Komite Revolusi Mozambique (COREMO) mulai beroperasi dari wilayah Zambia¹.

Perang gerilya itu tidak berkurang tetapi menjadi makin luas dan makin sengit, biarpun Portugal meningkatkan operasi militernya untuk menumpasnya. Pada awal tahun 1960-an kekuatan militer Portugis di Afrika hanya terdiri atas beberapa ribu orang, tetapi sejak pemberontakan itu semakin banyak pasukan didatangkan dari Portugal. Sejak tahun 1969 hampir seluruh Angkatan Darat, sebagian besar Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Kepolisiannya ditempatkan di Afrika. Untuk menghadapi perang gerilya itu dinas militer diperpanjang menjadi 4 tahun bagi semua pria antara 18 dan 45 tahun, termasuk 2 tahun di Afrika. Untuk membeayainya sejak tahun 1965 hampir separuh pendapatan negara dibelanjakan untuk pertahanan dan keamanan. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa perang kolonial telah menguras keuangan Portugal tetapi tidak berhasil mencapai sasarannya.

Guinea Bissau

Di Guinea Bissau pejoang-pejoang PAIGC berhasil menguasai dua pertiga wilayah, sedangkan kekuasaan tentara Portugis terbatas pada sekitar 50 pos yang diperkuat dan kaserne. Pasukan-pasukan Portugis sudah tidak dapat merebut kembali inisiatif militer, biarpun jumlahnya cukup besar, sekitar 30.000 orang.

¹ Cf. George Martelli, "Conflict in Portuguese Africa", dalam David M. Abshire dan Michael A. Samuels (Ed.), *op. cit.* hal 406 - 423; "A rebel who's who", Newsweek, 5 Pebruari 1973, hal. 27.

Lisabon sudah lama melepaskan negeri itu seandainya tidak takut hal itu akan meningkatkan tekanan gerilyawan di kepulauan Cape Verde yang sangat penting bagi strategi. Di bawah pimpinan Amilcar Cabral PAIGC tidak hanya berhasil membebaskan sebagian besar wilayah Guinea Bissau, tetapi juga membangunnya dengan mendirikan sekolah-sekolah, rumah sakit dan poliklinik, sistim peradilan yang teratur, memajukan pertanian, membangun jalan-jalan dan lain sebagainya. Secara demikian mereka mendapat banyak simpati serta bantuan bagi perjuangan mereka dan Amilcar Cabral diberi status resmi sebagai peninjau di PBB. Pembunuhannya pada awal 1973 tidak mengurangi kegiatan PAIGC tetapi bahkan meningkatkannya. Wakilnya Aristides Pereira menggantikannya sebagai Sekretaris Jendral partai. Pada tanggal 24 September 1973 Majelis Nasional Rakyat memproklamkan Republik Guinea Bissau yang segera mendapat pengakuan banyak negara dan PBB¹.

Angola

Di Angola pemberontakan tahun 1961 dan tindakan-tindakan represif Pemerintah Portugis banyak minta korban. Sekitar 50.000 orang Afrika dan 2.000 orang kulit putih tewas, sedangkan beratus-ratus ribu orang Afrika terpaksa mengungsi ke negara tetangga Zaire. Sebagai akibat operasi tentara Portugis, yang dari 3.000 bertambah menjadi 57.000 orang pada tahun 1973, kegiatan kaum nasionalis berkurang, tetapi pada tahun 1965 mereka mulai suatu gelombang baru aksi di daerah perbatasan dengan Zaire dan Zambia. Lambat laun mereka berhasil menguasai daerah luas di Angola Timur dan melakukan tekanan berat ke jurusan Barat. Akan tetapi aksi mereka itu kurang efektif karena adanya persaingan yang terus-menerus antara kelompok-kelompok gerilyawan Uni Nasional untuk Kemerdekaan Total Angola (UNITA), Gerakan Pembebasan Rakyat (MPLA) dan Pemerintah Revolusioner di Pengasingan (GRAE), untuk mendapatkan kekuasaan dan bantuan luar negeri².

¹Cf. Basil Davidson, loc. cit. hal. 148; "Portuguese overseas provinces", loc. cit. hal. 1246; Newsweek, 6 Mei 1974, hal. 17.

²Basil Davidson, loc. cit. hal. 148; George Martelli, "Conflict in Portuguese Africa", op. cit. hal. 406-415; Newsweek, 6 Mei 1974, hal. 17.

Mozambique

Di Mozambique medan perang gerilya mula-mula ialah dua propinsi Utara Cabo Delgado dan Niassa di mana pejuang-pejuang Front Pembebasan Mozambique (FRELIMO) kini menguasai daerah pedesaan yang luas. Pada tahun 1968 mereka juga mulai melancarkan aksi-aksi di propinsi Tete di Mozambique Tengah. Diarpun tentara Portugis belum kehilangan inisiatif seperti di Guinea Bissau, situasi militer Portugis adalah serius, terutama karena para gerilyawan berhasil mendapat dukungan rakyat daerah-daerah itu. Pasukan-pasukan Portugis, biarpun berjumlah 70.000 orang (1974) dan memiliki keunggulan persenjataan serta supremasi udara, tidak dapat berbuat banyak terhadap para gerilyawan, yang tidak hanya penuh semangat tetapi juga lihay dan bergerak dengan cepat. Dalam kelompok-kelompok kecil mereka menyergap patroli-patroli Portugis atau menyerang pos-pos militer, lalu menghilang untuk menyerang lagi di lain tempat, dan begitu seterusnya. Mereka juga mengacaukan lalu-lintas dengan meledakkan jembatan-jembatan, jalan kereta api dan memasang ranjau di jalan-jalan. Sebagai akibatnya perjalanan menjadi sangat lambat karena jalan harus diperiksa dahulu dan berbahaya karena sewaktu-waktu orang dapat dicegat para gerilyawan. Semuanya itu membuat perang sangat mahal bagi Portugal dan menegangkan urat syaraf tentaranya¹.

Menurut para peninjau mutu perang gerilya di negeri-negeri jajahan Portugis itu menjadi semakin tinggi berkat latihan dan perbaikan persenjataan, logistik, organisasi, disiplin dan taktik. Selain itu mereka berhasil mendapat dukungan rakyat, tidak hanya karena rakyat takut akan mereka tetapi juga karena semangat nasionalis yang semakin besar dan pembangunan yang mereka lakukan di daerah-daerah yang telah dibebaskan. Semuanya itu memberikan harapan baik bahwa lambat laun mereka akan berhasil mencapai sasaran perjuangan mereka membebaskan seluruh negeri. Harapan itu menjadi lebih besar dengan semakin kuatnya tekanan opini dunia, PBB dan negara-negara Afrika atas rejim Portugis agar mengakhiri politik kolonialnya.

¹Basil Davidson, loc. cit. hal. 148; George Martelli, "Conflict in Portuguese Africa", op. cit. hal. 420-423; Newsweek, 1 April 1974, hal. 23,

III. Peranan negara-negara Afrika

Dalam perjuangan kemerdekaan itu rakyat dan organisasi-organisasi gerilyawan itu mendapat dukungan dan bantuan dari negara-negara Afrika, yang tidak hanya mengutuk segala bentuk kolonialisme tetapi juga berjuang untuk mengakhirinya. Tekad yang bulat untuk membebaskan negeri-negeri jajahan itu bahkan menjadi dasar Organisasi Persatuan Afrika (CAU) di samping issue kedaulatan dan keutuhan teritorial mereka sendiri.

Pertama mereka melakukan tekanan berat atas rejim Portugis agar mengakui dan menghormati hak-hak rakyat negeri-negeri jajahannya, termasuk hak atas kemerdekaan. Dengan maksud itu mereka berusaha mengisolirnya dengan boikot politik, ekonomi dan perhubungan. Mereka juga membantu para gerilyawan, baik secara langsung maupun lewat Komite Pembebasan yang dibentuk CAU dengan maksud itu. Berbagai negara seperti Guinea, Senegal, Kongo, Zaire, Zambia, Tanzania, Kenya dan Aljazair menampung organisasi-organisasi gerilyawan dan memberikan fasilitas-fasilitas, sehingga mereka dapat menyusun kekuatan, melatih anggota-anggotanya dan melancarkan serangan-serangan.

Selain itu mereka berusaha menggerakkan opini dunia dan menciptakan suatu iklim opini anti kolonial, terutama di forum PBB. Berkat perjuangan mereka dan negara-negara anti kolonial lainnya, termasuk Indonesia, baik Sidang Umum PBB maupun Dewan Keamanan mengeluarkan resolusi-resolusi, yang tidak hanya mengutuk kolonialisme tetapi juga mendesak negara-negara kolonial agar menghormati hak-hak nasional rakyat Afrika dan mengenakan sanksi-sanksi terhadap sikap membandel rejim-rejim tersebut.

Salah satu yang sangat penting dan merupakan tonggak sejarah dalam perjuangan untuk menghapus kolonialisme ialah resolusi Sidang Umum tanggal 14 Desember 1960, No. 1514, yang memuat azas-azas proses dekolonisasi dan pada intinya mewajibkan PBB dan negara-negara anggotanya untuk segera mengambil langkah-langkah seperlunya agar negeri-negeri jajahan memperoleh kemerdekaan tanpa syarat atau reservasi manapun sesuai dengan kemauan rakyatnya (lihat Dokumen). Sebagai langkah pertama dibentuklah Komite Dekolonisasi untuk mempelajari aplikasi pernyataan itu dan mengajukan saran-saran.

Meletusnya pemberontakan di Angola pada tanggal 15 Maret 1961 menjadikan Portugal sumber keprihatinan utama bagi PBB. Sejak itu Sidang Umum dan Dewan Keamanan mengeluarkan resolusi-resolusi yang mengecam politik kolonial Portugal dan menyerukan perubahan-perubahan radikal, tetapi sampai terjadinya kudeta militer pada tanggal 25 April 1974 Pemerintah Portugal selalu menolaknya dengan dalih bahwa negeri-negeri yang dikuasainya di Afrika bukanlah koloni melainkan bagian integral wilayahnya.

Resolusi Sidang Umum tanggal 20 April 1961 berseru kepada Portugal agar melakukan pembaharuan-pembaharuan dalam rangka pemberian kemerdekaan kepada koloni-koloninya sesuai dengan resolusi 1514 tersebut. Resolusi Dewan Keamanan tanggal 9 Juni 1961 minta kepadanya agar menghentikan tindakan-tindakannya menindas rakyat Angola. Resolusi Sidang Umum tanggal 30 Januari 1962 mengulangi pernyataan bahwa bangsa Angola berhak atas hak untuk menentukan nasibnya sendiri dan berseru kepada Portugal agar menghentikan penindasannya dan melakukan pembaharuan-pembaharuan politik, sosial dan ekonomi. Anggota-anggota PBB dimintanya jangan memberikan bantuan kepada Portugal. Resolusi Sidang Umum tanggal 14 Desember 1962 mendesak negara-negara agar mencegah penjualan senjata kepada Portugal dan minta kepada Dewan Keamanan agar menjamin pelaksanaannya. Resolusi Dewan Keamanan tanggal 31 Juli 1963 berseru kepada Portugal agar mengakui hak-hak rakyat Afrika di koloni-koloninya atas self determination dan kemerdekaan, dan minta kepada anggota-anggota PBB agar menghentikan bantuan masing-masing kepada Portugal. Resolusi Dewan Keamanan tanggal 11 Desember 1963 minta kepada anggota-anggota PBB agar memenuhi resolusi yang diambil dalam bulan Juli sebelumnya.

Beberapa bulan sebelumnya delegasi-delegasi Afrika pada Konferensi Internasional mengenai Pendidikan Umum di Jenewa meninggalkan sidang sebagai protes terhadap hadirnya delegasi Portugis. Kejadian itu merupakan awal usaha-usaha untuk mengeluarkan Portugal dari lembaga-lembaga internasional sebagai sanksi terhadap sikapnya yang membandel. Secara berturut-turut Portugal dikeluarkan dari Komisi Ekonomi PBB untuk Afrika, dari Konferensi Internasional Pendidikan Umum, Komite Regional WHO untuk Afrika dan lain-lain sebagainya.

Dalam musim panas 1965 Komite Dekolonisasi PBB mengunjungi Afrika dan menerima delegasi serta petisi dari 13 partai nasionalis dari Angola, Mozambique, Guinea Bissau, Cape Verde dan Sao Tome e Principe. Pada sidang terakhir Komite mengeluarkan suatu resolusi yang mengocam negara-negara NATO karena membantu Portugal dan minta kepada mereka agar mengenakan sanksi-sanksi terhadapnya selaras dengan resolusi-resolusi PBB tersebut.

Resolusi Dewan Keamanan tanggal 23 November 1965, selain mengulangi seruan resolusi-resolusi sebelumnya tentang hak untuk menentukan nasib sendiri dan hidup merdeka, juga minta kepada Portugal agar menghentikan penindasannya, menarik pasukan-pasukannya dan memberikan amnesti politik. Resolusi juga minta kepadanya agar berunding dengan kaum nasionalis tentang penyerahan kekuasaan kepada lembaga-lembaga hasil pemilihan umum. Oleh sebab Portugal terus membandel, pada tanggal 18 Desember 1965 Sidang Umum menerima sebuah resolusi yang minta kepada anggota-anggota PBB agar memutuskan hubungan diplomatik dengan Portugal dan melakukan boikot internasional atas senjata dan perdagangan. Pada tahun-tahun berikutnya PBB mengeluarkan resolusi-resolusi yang senada. Setelah mengakui Republik Guinea Bissau, pada tanggal 17 Desember 1973 Sidang Umum menerima suatu resolusi yang menyatakan bahwa delegasi Portugis tidak mewakili Angola, Mozambique dan Guinea Bissau.

Oleh sebab semuanya itu tidak memberikan hasil yang diharapkan, negara-negara Afro-Asia berkali-kali minta kepada Dewan Keamanan agar menggunakan kekerasan terhadap Portugal, tetapi sejauh ini sia-sia karena berbagai negara besar tidak menyyetujuinya. Negara-negara Afrika sendiri ingin menggunakan kekerasan untuk membebaskan negeri-negeri tersebut, tetapi merasa tidak memiliki kemampuan militer seperlunya untuk menghadapi tentara Portugis yang membelanya¹.

IV. Prospek kemerdekaan koloni-koloni Portugis

Kudeta militer yang berhasil menumbangkan rejim otoriter Presiden Thomaz dan H^o Caetano dan menggantinya dengan rejim baru di bawah pimpinan Jendral De Spinoia baru-baru ini

¹Cf. George Martelli, "The issues internationalized", loc. cit. hal. 378-385

membuka lembaran baru dalam sejarah negeri-negeri jajahan Portugis. Kudeta tidak hanya dilancarkan untuk mengembalikan hak-hak sipil di Portugal tetapi juga untuk mengakhiri politik kolonial yang selain gagal juga merupakan suatu bencana bagi negara.

1. Politik baru Pemerintah De Spinola

Sudah barang tentu Pemerintah Portugis baru di bawah pimpinan De Spinola tidak akan meneruskan politik kolonial rejim lama dan akan merintis suatu jalan baru, tetapi kini kita belum mengetahui dengan pasti bentuk politik baru itu karena adanya perbedaan pendapat, baik di Portugal maupun di negeri-negeri jajahannya di Afrika. Sehubungan dengan itu terdapat berbagai kemungkinan penyelesaian masalah sekitar negeri-negeri jajahan itu.

Pendirian De Spinola

Kejadian-kejadian di Portugal menunjukkan bahwa gagasan-gagasan De Spinola telah memainkan peranan penting dalam pergolakan di negeri itu dan dapat diperkirakan bahwa gagasan-gagasan itu akan ikut serta mempengaruhi penyusunan politik Pemerintahnya mengenai negeri-negeri jajahannya. Pada pokoknya pendiriannya itu adalah sebagai berikut.

Dalam bukunya Portugal dan Hari Depan De Spinola memperingatkan bahwa peperangan di Afrika tidak dapat dimenangkan oleh Portugal secara militer dan hanya akan menguras sumber kemanusiaan dan keuangan negara, makin mengisolirnya dari pergaulan internasional, dan menghambat pembangunan. Kenyataannya 13 tahun perang (1961-1974) telah minta korban 5.000 orang tentara tewas dan menelan biaya sekitar \$ 6.000 juta tetapi ternyata gagal mencapai sasarannya. Perang gerilya tidak berkurang, tetapi bahkan meluas dan semakin efisien sejalan dengan perbaikan organisasi, disiplin, persenjataan, logistik, taktik dan meluasnya dukungan rakyat setempat. Sebaliknya pembangunan menjadi terkatung-katung, sehingga Portugal kini merupakan salah satu negara yang paling miskin dan terbelakang di Eropa. Perkembangan ekonominya sangat ketinggalan dibandingkan

dengan negara-negara Eropa lainnya. Pendapatan per jiwa per tahun kini sekitar seperempat pendapatan per jiwa di negara-negara yang kaya dan maju. Sebagai salah satu akibatnya telah bertahun-tahun berlangsung suatu manpower drain, suatu pengurasan tenaga kerja. Dari 3,1 juta orang angkatan kerja, sekitar 1,6 juta orang bekerja sebagai tenaga kerja emigran di negara-negara tetangga yang lebih maju karena di tanah air mereka sendiri tiada kesempatan kerja seperlunya. Pengurasan tenaga kerja serupa itu sangat mengkhawatirkan hari depan negara dan bangsa.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan itu De Spinola mengusulkan agar peperangan di Afrika segera dihentikan. Menurut dia satu-satunya jalan untuk mempertahankan pengaruh Portugis di negeri-negeri jajahannya di Afrika ialah suatu penyelesaian politik. Dalam rangka itu diusulkannya pembentukan suatu negara federal yang akan terdiri atas Portugal dan negeri-negeri jajahannya yang masing-masing memiliki otonomi intern penuh, sehingga dapat mengatur segala sesuatu dalam negeri, sedangkan pemerintah federal di Lisabon akan menguasai pertahanan dan hubungan luar negeri. Dengan perkataan lain, dia mengusulkan agar kepada negeri-negeri jajahan itu diberikan otonomi penuh dan status politiknya dirubah dari propinsi menjadi negara bagian. Dengan asumsi bahwa mayoritas penduduknya akan memilih persatuan dengan Portugal dalam federasi itu, selanjutnya dia mengusulkan agar diadakan referendum di negeri masing-masing yang akan memberikan kesempatan kepada rakyatnya untuk menentukan hari depan negerinya. Dia merasa bahwa Portugal memerlukan wilayah-wilayah jajahannya di Afrika karena takut tanpa jajahan-jajahannya itu negaranya akan tetap menjadi negara terbelakang dan termiskin di Eropa¹.

Pendirian golongan kiri

Golongan kiri yang sesudah kudeta tampil ke muka sebagai kekuatan politik yang besar, khususnya Partai Sosial pimpinan Dr. Mario Soares dan Partai Komunis pimpinan Alvaro Cunhal, setuju dengan De Spinola bahwa peperangan di Afrika harus segera mungkin dihentikan dan sengketa diselesaikan secara

¹Cf. "No-win proposition", Newsweek, 1 April 1974, hal. 23; "A book, a song and then a revolution", Time, 6 Mei 1974, hal. 9.

politik lewat perundingan-perundingan, tetapi berlainan dengan dia mereka memperjuangkan kemerdekaan penuh bagi negeri-negeri jajahan di Afrika itu. Sehubungan dengan itu mereka mendesak De Spinola agar segera mengadakan perundingan-perundingan dengan wakil-wakil sah rakyat Mozambique, Angola dan Guinea Bissau. Menurut mereka rakyat negeri-negeri itu telah siap untuk merdeka dan mengambil alih kekuasaan¹.

Pendirian perwira-perwira muda

Selain Junta Militer pimpinan De Spinola dan golongan kiri terdapat kelompok ketiga yang menurut banyak pengamat merupakan kekuatan politik yang dominan, yaitu perwira-perwira muda yang melancarkan kudeta dan kemudian membentuk suatu Komite Koordinasi untuk mengawasi Junta Militer. Kelompok ini sepenuhnya mendukung pendirian De Spinola bahwa perang kolonial harus segera mungkin dihentikan, tetapi mereka menandakan bahwa keputusan terakhir adalah di tangan rakyat negeri-negeri yang bersangkutan. Menurut mereka gagasan federasi De Spinola akan merupakan angan-angan atau impian belaka kalau rakyat tidak menghendaknya. Tetapi mereka setuju dengan usulnya agar diadakan referendum yang akan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menyatakan kemauannya dan menentukan hari depan negerinya².

Tanggapan para gerilyawan

Menanggapi usul Junta Militer tersebut, organisasi-organisasi gerilyawan menyatakan bahwa mereka tidak puas dengan otonomi intern tetapi menginginkan kemerdekaan dan akan meneruskan perjuangan mereka sampai sasaran itu tercapai. Mereka berpegang teguh pada prinsip yang telah diakui umum, bahwa setiap bangsa mempunyai hak penentuan diri dan kemerdekaan. Mereka bersedia berunding dengan Portugal untuk membicarakan penyerahan kekuasaan dan pentahapannya tetapi menolak merundingkan kemerdekaannya itu sendiri³. PAIGC

¹Cf. "The flower revolution", Newsweek, 13 Mei 1974, hal. 44; "In bed with the reds", Newsweek, 20 Mei 1974, hal. 20.

²Cf. "The flower revolution", loc. cit. hal 45.

³Cf. Berita AFP yang dikutip Indonesian Observer, 29 April 1974.

bahkan menuntut agar Portugal mengakui Republik Guinea Bissau yang telah diproklamlirkan dan diakui PBB dan sejumlah besar negara-negara¹.

Rencana Pemerintah Baru

Pemerintah baru yang dibentuk pada tanggal 15 Mei dan merupakan suatu koalisi yang terdiri atas 3 orang sosialis, 2 orang komunis, 3 orang kiri tengah, 5 orang independen dan seorang perwira, di bawah Presiden De Spínola, berusaha mengambil jalan tengah dan atas pengakuan bahwa setiap bangsa mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri memutuskan untuk mengadakan referendum di negeri-negeri jajahannya pada tanggal 31 Maret 1975. Pemerintah akan melaksanakan apa yang diputuskan rakyat negeri masing-masing dalam referendum itu, dan akan memberikan kemerdekaan kalau rakyat menghendakinya. Sehubungan dengan itu pemerintah berseru kepada organisasi-organisasi gerilyawan untuk meletakkan senjata, kembali ke negerinya masing-masing dan menjadi partai politik. Pemerintah juga menawarkan perundingan-perundingan dengan mereka untuk mencari suatu penyelesaian damai².

Dalam rangka itu pemerintah Portugis mengirimkan delegasi-delegasi ke negeri-negeri jajahannya untuk memberikan penerangan tentang perubahan-perubahan radikal yang terjadi di Portugal dan menyelidiki aspirasi-aspirasi golongan-golongan masyarakat. Menurut delegasi yang dikirimkan ke Timor Portugis dan Macao pemerintah Portugis sedang menyiapkan mekanisme pemungutan suara dalam referendum itu, semacam undang-undang pemilihan umum³. Mula-mula dikatakan, bahwa referendum itu akan diadakan atas dasar satu orang satu suara, tetapi kemudian dikatakan, bahwa hanya mereka yang memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain dapat membaca dan menulis dalam bahasa Portugis, akan boleh memberikan suara.

¹Cf. Berita UPI yang dikutip Indonesian Observer, 15 Mei 1974.

²Cf. Peter Uebersex, "Self-determination for Portugals and African territories", Indonesian Observer, 30 Mei 1974; berita UPI yang dikutip Indonesian Observer, 17 Mei 1974 dan 11 Juni 1974.

³Cf. Suara Karya, 3 Juni 1974.

Itulah yang selama ini berlaku pada pemilihan-pemilihan umum yang diadakan untuk memilih anggota-anggota Dewan Legislatif negeri masing-masing. Ketentuan semacam itu berarti, bahwa sebagian besar rakyat Afrika tidak akan ikut dalam referendum dan bahwa suara penduduk kulit putih, yang merupakan suatu minoritas, akan mempunyai pengaruh besar di luar proporsinya. Akan tetapi hal itu belum merupakan keputusan terakhir, karena kaum nasionalis menuntut pelaksanaan azas satu orang satu suara dan hanya dengan syarat itu akan menyetujui rencana referendum tersebut.

2. Tanggapan rakyat di Afrika

Penduduk kulit putih negeri-negeri jajahan Portugis di Afrika menanggapi rencana pemerintah itu secara berbeda-beda. Sebagian besar mendukungnya, antara lain Kelompok Persatuan Mozambique (GUMC), tetapi banyak juga yang menentangnya, termasuk Front Kemerdekaan dan Kontinuitas Barat (FICC) di Mozambique. Golongan yang keras ini bermaksud mempertahankan negeri-negeri itu sebagai wilayah Portugis. Ada juga yang ingin mempertahankan supremasi kulit putih dan memikirkan suatu pernyataan kemerdekaan unilateral seperti yang terjadi di Rhodesia pada tahun 1965, tetapi jumlah mereka tidak besar dan pemerintah telah mengambil tindakan-tindakan untuk mencegahnya¹.

Juga di kalangan rakyat Afrika terdapat bermacam-macam pendapat, tetapi pada garis besarnya mereka dapat dibedakan dalam dua kelompok: moderat dan radikal. Yang pertama dapat menerima otonomi intern tawaran pemerintah Portugis, paling tidak sebagai persiapan untuk kemerdekaan. Yang kedua, termasuk organisasi-organisasi gerilyawan, menolak tawaran itu dan menuntut kemerdekaan sekarang juga. Seperti diutarakan di atas, mereka hanya bersedia mengadakan perundingan-perundingan dengan Portugal untuk membicarakan penyerahan kekuasaan dan pentahapannya, tidak tentang kemerdekaan itu sendiri. PAIGC bahkan menuntut kepada Portugal agar mengakui Republik Guinea Bissau yang telah diproklamkan². Karena

¹Cf. Berita UPI yang dikutip Indonesian Observer, 17 Mei 1974; lihat juga berita Antara yang dikutip Suara Karya, 14 Mei 1974.

²Cf. Berita AFP yang dikutip The Indonesian Times, 30 Mei 1974.

sikap keras itu perundingan-perundingan yang dimulai di London dan diteruskan di Aljazair antara Portugal dan FAIGC tidak berhasil mencapai suatu persetujuan. Demikianpun perundingan-perundingan antara Portugal dan FRELIMO di Lusaka. Pihak gerilyawan tetap menuntut kemerdekaan, sedangkan Portugal berpendirian bahwa harus diadakan suatu referendum agar rakyat dapat memilih antara otonomi intern dan kemerdekaan. Sejauh ini hanya di Angola pemerintah Portugis berhasil mencapai persetujuan dengan satu dari tiga organisasi gerilyawan, yaitu Uni untuk Kemerdekaan Total Angola (UNITA), untuk menghentikan tembak-menembak dan dengan demikian menciptakan iklim baik bagi perundingan-perundingan perdamaian¹; Sementara itu Zambia, Zaire dan Tanzania berusaha keras untuk meyakinkan para gerilyawan agar memperlunak sikap mereka.

Kemungkinan-kemungkinan

Mengingat janji-janji dan langkah-langkah yang telah diambil rejim baru Portugal dalam rangka dekolonisasi negeri-negeri jajahannya di Afrika di satu pihak dan tanggapan golongan kulit putih dan rakyat Afrika, khususnya para pejoang kemerdekaan, di lain pihak, perkembangan politik selanjutnya dapat diperkirakan seperti berikut. Perundingan-perundingan yang telah dimulai antara Portugal dan organisasi-organisasi gerilyawan dan untuk sementara waktu dihentikan sebelum mencapai suatu persetujuan karena adanya perbedaan pendapat yang besar, akan dilanjutkan setelah kedua pihak mendapat kesempatan untuk memikirkan posisi pihak lawan. Biar pun belum mencapai suatu persetujuan dan bentrokan-bentrokan bersenjata masih berlangsung terus, diadakannya perundingan-perundingan itu sendiri telah merupakan suatu kemajuan. Bahwa kedua pihak telah bertemu muka dan mengadakan pertukaran pikiran serta tawar-menawar mengungkapkan suatu kesediaan untuk mencari suatu penyelesaian damai sengketa mereka. Portugal telah menyatakan bersedia memberikan kemerdekaan kepada Mozambique, Angola dan Guinea Bissau kalau rakyat menghendakinya dan sehubungan dengan itu merencanakan suatu referendum. Rupanya perubahan sikap yang radikal itulah yang telah mendorong Zambia, Zaire dan Tanzania untuk mendesak para gerilyawan agar memperlunak sikap mereka.

¹Cf. Berita AFP yang dikutip Indonesian Observer, 19 Juni 1974

Dapat diperkirakan, bahwa kedua pihak akan bertemu lagi untuk meneruskan perundingan-perundingan yang akan menghasilkan persetujuan gencatan senjata dan kemudian juga suatu penyelesaian damai. Kemungkinan besar organisasi-organisasi gerilyawan, sebagai wakil negeri mereka masing-masing, dengan syarat-syarat tertentu akan menyetujui referendum usul Portugal. Sebagai syarat utama mereka akan menuntut agar referendum tidak hanya diadakan di bawah pengawasan PBB secara bebas, tetapi juga atas dasar satu orang satu suara. Setelah tawar-menawar, Portugal akhirnya akan menerima syarat itu, sehingga pada waktu yang disetujui kedua pihak, akan dilangsungkan referendum di mana rakyat akan menentukan status politik dan hari depan negerinya. Rakyat dapat memilih antara kemungkinan-kemungkinan berikut: menjadi negara bagian negara federal Portugis seperti yang diusulkan pemerintah De Spínola atau menjadi negara merdeka dalam persema-kmuran Portugis atau di luarnya.

Kemungkinan yang pertama berarti, bahwa ketiga negeri itu akan mendapatkan otonomi dalam negeri. Masing-masing negeri akan menjadi negara bagian negara federal Portugis yang akan dibentuk dan mempunyai Pemerintah Federal di Lisabon. Masing-masing negara bagian akan mempunyai lembaga-lembaga negaranya sendiri seperti parlemen, kabinet, mahkamah agung dan sebagainya. Akan tetapi urusan pertahanan dan hubungan luar negeri akan dipegang Pemerintah Federal. Hubungan keduanya itu akan ditetapkan lebih lanjut dalam UUD yang akan disusun dan disetujui semua negara bagian. Walaupun juga akan merupakan negara bagian, Portugal akan tetap memainkan peranan yang dominan. Kemungkinan besar bahasa Portugis akan ditetapkan menjadi bahasa resmi negara federal.

Kemungkinan yang kedua berarti bahwa negeri-negeri jajahan akan menjadi negara merdeka seperti negara-negara Afrika lainnya yang lebih dahulu mendapatkan kemerdekaan. Negara masing-masing tidak hanya akan mempunyai parlemen, kabinet dan mahkamah agung sendiri, tetapi juga seorang kepala negara. Selanjutnya negara-negara itu dapat menjalin hubungan istimewa dengan Portugal dan bersama-sama membentuk semacam persema-kmuran menurut pola persema-kmuran Inggris atau Perancis. Akan tetapi mereka juga dapat menempuh jalan lain dan menjalin hubungan antar negara biasa.

Manakah kemungkinan yang akan menjadi kenyataan masih sukar dikatakan. Hal itu terutama akan bergantung pada kemauan rakyat yang akan dinyatakan dalam referendum, tetapi kemauan rakyat itu sendiri akan dipengaruhi banyak faktor. Salah satu di antaranya yang penting ialah proses dekolonisasi yang tidak dapat dibendung. Cepat atau lambat setiap negeri yang masih dikuasai negara lain akan mendapatkan kemerdekaan, tidak hanya karena bergelornya semangat nasionalisme rakyat yang bersangkutan dan perjuangannya, tetapi juga tekanan dari luar yang semakin berat. Opini dunia, negara-negara anti kolonial dan PBB akan meningkatkan tekanan mereka atas rejim kolonial yang bersangkutan sampai berhasil. Tanda-tanda menunjukkan bahwa sebagian besar rakyat negeri-negeri jajahan Portugis di Afrika itu tidak akan puas dengan otonomi tetapi akan memilih kemerdekaan. Oleh sebab Pemerintah Portugis telah berjanji akan menghormati kemauan rakyat, sebagai hasil referendum itu Mozambique, Angola dan Guinea Bissau akan menjadi negara merdeka.

Akan tetapi kemungkinan besar negara-negara baru itu akan menjalin hubungan istimewa dengan Portugal dan bersama-sama membentuk suatu persemakmuran. Berlainan dengan keadaan negara-negara bekas jajahan lainnya, kebanyakan kolonis Portugis akan menjadi warga negara dengan persamaan hak dan kewajiban. Biar pun ada yang akan pergi, rupanya tidak akan terjadi suatu eksodus seperti misalnya di Aljazair dan Zaire setelah mendapatkan kemerdekaan. Seperti diuraikan di atas, orang-orang Portugis tidak mengenal diskriminasi rasial dan mudah berasimilasi dengan penduduk pribumi di manapun. Yang dicita-citakan ialah suatu masyarakat multi-rasial seperti di bekas koloni Portugis Brasilia. Lagi pula Pemerintah Portugis akan memperjuangkannya, tidak hanya karena cita-cita tersebut, tetapi juga karena Portugal tidak mampu menerima kembali sekian banyak orang. Biayanya tidak akan terpikul oleh negara yang telah menjadi terbelakang dan termiskin di Eropa sebagai akibat 13 tahun perang kolonial itu.

V. Hari Depan Timor Portugis

Politik rejim baru Portugal dan perkembangan politik di negeri-negeri jajahannya di Afrika juga mempengaruhi

perkembangan politik koloni Portugis yang berbatasan dengan Indonesia, Timor Portugis, biarpun sejauh ini rakyatnya pada umumnya belum mempunyai kesadaran politik dan belum mengadakan gerakan-gerakan kemerdekaan. Sesuai dengan keputusan Pemerintah De Spinoła, bahwa azas demokrasi juga akan diterapkan di propinsi-propinsi seberang lautan, dua minggu sesudah kudeta Gubernurnya, Kolonel Fernando Alves Aldeia, mengumumkan bahwa rakyat bebas untuk mendirikan partai-partai politik¹. Kemudian juga diumumkan bahwa pada tanggal 31 Maret 1975 akan dilangsungkan suatu referendum untuk menentukan status politik dan hari depan Timor Portugis². Maka terbukalah bagi negeri itu beberapa kemungkinan: menjadi negeri otonom dalam federasi dengan Portugal, menjadi negara merdeka dalam atau di luar persemakmuran Portugis, atau juga bergabung dengan Indonesia sebagai salah satu propinsinya.

Sesuai dengan kemungkinan-kemungkinan itu sejauh ini telah didirikan tiga partai politik. Partai Uni Demokrat, yang mendapat banyak dukungan di kalangan penduduk kulit putih, menginginkan agar Timor Portugis tetap di bawah bendera Portugis sebagai negara bagian federasi Portugis usul De Spinoła. Partai Sosial Demokrat memperjuangkan kemerdekaan, sedangkan partai yang ketiga, Perhimpunan Integrasi Timor Indonesia (AITI) menginginkan agar Timor Portugis bergabung dengan Indonesia dan menjadi salah satu propinsinya³.

Ketiga partai itu bersaing untuk mempengaruhi rakyat dan memenangkan referendum. Waktu ini masih sukar dikatakan partai mana yang akan menang. Masing-masing mempunyai pengikut-pengikutnya, tetapi sejauh ini belum diketahui kekuatannya. Akan tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan karena akan memainkan peranan penting. Salah satu faktor ialah perjuangan partai-partai politik itu sendiri dan kemampuannya untuk mendapatkan dukungan rakyat yang sebagian besar masih

¹Cf. Sinar Harapan, 24 Mei 1974; "Revolusi di bar dan di biara", laporan wartawan Tempo atas kunjungannya ke Timor Portugis, Tempo, 15 Juni 1974, hal. 9.

²Cf. Suara Karya, 3 Juni 1974

³Cf. "Revolusi di bar dan di biara", loc. cit. hal. 9-13; John A Syukur, "Tiga parpol menuju plebisit di Timor Portugis", laporan kunjungan ke Timor Portugis yang dimuat dalam Suara Karya pada tanggal 6, 7, 8, 10, 11 dan 12 Juni 1974; lihat juga Peter Bathurst, "Freedom of choice", Far Eastern Economic Review, 17 Juni 1974, hal. 28-29.

buta huruf dan belum memiliki kesadaran politik. Dalam keadaan semacam itu pemimpin-pemimpin rakyat seperti raja-raja, kepala-kepala suku, pastor-pastor dan lain-lain mempunyai pengaruh yang besar. Faktor penting lain ialah proses dekolonisasi tersebut di atas yang tidak dapat dibendung. Perkembangan politik di negeri-negeri jajahan Portugis di Afrika juga akan memegang peranan. Kemungkinan besar Timor Portugis akan mengikuti jejak negeri-negeri itu untuk melepaskan diri dari Portugal.

Dengan demikian sebenarnya hanya ada dua alternatif: memperoleh kemerdekaan dengan atau tanpa hubungan istimewa dengan Portugal atau bergabung dengan Indonesia. Alternatif yang pertama secara obyektif kurang menguntungkan dan bahkan mengandung bahaya. Sebagai negeri kecil, miskin dan terbelakang, Timor Portugis akan sukar mempertahankan kemerdekaannya dan mudah menjadi mangsa negara besar yang ingin mendapatkan tempat berpijak sebagai pangkalan untuk memperluas daerah pengaruhnya, terutama karena negeri itu strategis penting sebagai pusat komunikasi di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik Selatan dan sebagai tempat untuk membangun pangkalan udara dan laut. Dengan perkataan lain Timor Portugis setelah merdeka akan menjadi incaran negara-negara besar dan mudah memancing persaingan antara mereka, dan dengan demikian menjadi ancaman bagi keamanan negara-negara tetangga dan stabilitas politik kawasan itu. Indonesia dan Australia tidak akan membiarkan perkembangan semacam itu.

Sebelum kudeta militer di Portugal, Timor Portugis tidak merupakan masalah bagi Indonesia. Walaupun dalam Mukadimah UUD 1945 mengakui hak setiap bangsa atas kemerdekaan dan mengambil sikap anti kolonial, terhadap Timor Portugis Indonesia sejauh ini berpegang teguh pada prinsip tidak campur tangan dan memelihara politik bertetangga baik. Sesuai dengan itu Indonesia mempunyai seorang Konsul di Dili dan Portugal seorang Konsul di Jakarta, yang mewakili kepentingan-kepentingan Portugal dan negeri-negeri jajahannya. Akan tetapi keadaan berubah dengan perubahan-perubahan radikal yang terjadi akibat kudeta tersebut. Timor Portugis menjadi masalah bagi Indonesia karena perkembangannya sekarang ini dapat membahayakan keamanannya dan stabilitas politik kawasan. Oleh sebab itu Indonesia terpaksa melibatkan diri untuk mencegah negeri tetangganya itu menjadi sasaran perebutan kekuasaan negara-negara besar dan dijadikan

pangkalan subversi yang membahayakannya. Apabila Timor Portugis dalam referendum yang akan datang ini memutuskan untuk bergabung dengannya, kiranya selaras dengan kepentingan nasionalnya kalau Indonesia menerimanya. Dengan jalan legal Indonesia kiranya bahkan dapat memajukan perkembangan itu.

VI. Beberapa kesimpulan

Kudeta militer di Portugal tidak hanya membawa perubahan-perubahan radikal di negeri itu, tetapi juga meningkatkan prospek kemerdekaan negeri-negeri jajahannya, khususnya di Afrika di mana telah bertahun-tahun kaum nasionalis melancarkan suatu perang gerilya, yang menjadi semakin efektif sejalan dengan perbaikan organisasi, disiplin, persenjataan, logistik dan taktik para gerilyawan dan meluasnya dukungan rakyat. Biarpun mengerahkan hampir seluruh kekuatan militernya, Pemerintah Portugis tidak berhasil menumpas perang gerilya itu dan menyelesaikan persoalan secara militer. Selain itu negara-negara Afrika, PBB dan opini dunia melakukan tekanan yang semakin berat atasnya agar segera memberikan kemerdekaan kepada negeri-negeri jajahannya.

Pemerintah baru di bawah pimpinan Jendral De Spinola, kepala Junta Militer yang dipilih menjadi Presiden, menempuh politik baru terhadap negeri-negeri jajahannya di Afrika berdasarkan keyakinan, bahwa sengketa Portugal dengan kaum nasionalis tidak dapat diselesaikan secara militer dan oleh sebab itu perlu dicari suatu penyelesaian politik. Dengan asumsi bahwa mayoritas rakyat Afrika akan menerima otonomi intern dalam federasi dengan Portugal sesuai dengan pendapat De Spinola, diusulkannya agar di negeri-negeri itu diadakan suatu referendum untuk memutuskan status politik dan hari depannya masing-masing.

Negeri-negeri itu akan dapat memilih antara beberapa kemungkinan: menjadi negeri otonom dalam negara federal Portugis, menjadi negara merdeka yang lepas sama sekali dari Portugal atau menjadi negara merdeka dalam perserikmuran Portugis. Tanda-tanda menunjukkan bahwa kemungkinan yang ketiga itulah kiranya yang akan menjadi kenyataan. Dengan perkataan lain, negeri-negeri itu akan menjadi merdeka,

tetapi secara sukarela akan menjalin suatu hubungan istimewa dengan Portugal dan bersama-sama membentuk suatu persemaakmuran di mana Portugal akan memegang peranan penting. Kemungkinan besar kolonis-kolonis Portugis, sekitar 600.000 orang, akan menjadi warga negara dan dengan golongan-golongan penduduk lainnya membangun suatu masyarakat multirasial tanpa diskriminasi rasial.

Bagi Timor Portugis terbuka tiga kemungkinan, yaitu menjadi otonom sebagai negara bagian federasi Portugis, menjadi merdeka dengan atau tanpa hubungan istimewa dengan Portugal, atau bergabung dengan Indonesia sebagai salah satu propinsinya. Kemungkinan yang pertama adalah tipis, sedangkan yang kedua kurang menguntungkan dan mengandung bahaya bagi keamanan dan kestabilan politik kawasan Asia Tenggara dan Pasifik Selatan.

Sebagai negara yang dalam Mukadimah UUD-nya mengakui hak setiap bangsa atas kemerdekaan dan sesuai dengan itu bekerja sama dengan negara-negara anti kolonial lainnya untuk mengakhiri kolonialisme dalam segala bentuknya, Indonesia dengan gembira menyambut perkembangan politik negeri-negeri jajahan Portugis itu dan meneruskan perjuangannya agar negeri-negeri itu segera mendapatkan kemerdekaan. Khususnya mengenai Timor Portugis, Indonesia sebagai negara tetangga selain mengikuti perkembangan politiknya dengan saksama hendaknya juga mengambil langkah-langkah untuk mencegah negeri itu menjadi sasaran perebutan kekuasaan negara-negara besar dan dijadikan pangkalan subversi yang membahayakan keamanannya. Dengan jalan legal Indonesia kiranya bahkan dapat ikut memajukan perkembangan menuju integrasi dengannya.

DOKUMEN



DEKLARASI DEKOLONISASI PBB

Setelah menandatangani pada akhir Mukadimah perlunya segera dan tanpa syarat mengakhiri kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, pada tanggal 14 Desember 1961 Majelis Umum PBB menyatakan dalam salah satu resolusinya (Resolusi Dekolonisasi) azas-azas berikut:

1. Penaklukan, penguasaan dan pemerasan bangsa-bangsa oleh kekuasaan asing itu melanggar hak-hak azasi manusia, bertentangan dengan Piagam PBB, dan merupakan hambatan bagi usaha memajukan perdamaian dan kerjasama dunia.
2. Semua bangsa mempunyai hak penentuan diri; berdasarkan hak itu mereka dengan bebas menentukan status politik mereka dan mengusahakan perkembangan ekonomi, sosial dan kebudayaan mereka.
3. Kurangnya persiapan politik, ekonomi, sosial atau pendidikan tidak boleh menjadi dalih untuk menunda kemerdekaan.
4. Semua aksi bersenjata atau segala macam tindakan repressif terhadap bangsa-bangsa jajahan harus dihentikan agar mereka dapat melaksanakan hak mereka atas kemerdekaan penuh secara damai, dan keutuhan wilayah nasional mereka harus dihormati.
5. Di negeri-negeri perwalian dan jajahan yang belum mencapai kemerdekaan penuh harus segera diambil tindakan-tindakan untuk memindahkan seluruh kekuasaan kepada rakyat wilayah-wilayah itu, tanpa syarat atau reservasi apapun, sesuai dengan pernyataan kemauan dan keinginan mereka, tanpa membedakan ras, kepercayaan atau warna kulit, agar mereka dapat menikmati kemerdekaan dan kebebasan sepenuhnya.
6. Setiap percobaan yang bertujuan merusak secara parsial atau total kesatuan dan keutuhan wilayah suatu negeri adalah tidak selaras dengan tujuan-tujuan dan azas-azas Piagam PBB.
7. Semua negara harus melaksanakan secara lengkap dan tepat ketentuan-ketentuan Piagam PBB, Deklarasi Universal Hak-hak Azasi Manusia dan Deklarasi ini atas dasar persamaan, tidak mencampuri urusan intern semua negara, dan hormat terhadap hak-hak kedaulatan segala bangsa dan keutuhan wilayah mereka."

Sumber: Ian Brownlie, Basic documents on human rights (Oxford 1971) hal. 115.

